

Analisis Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Dana Desa : Kajian Literasi

Muh. Adzam¹, Hanna Usnitayati², Afrian Arga Prastya³, Naufal Afaf Bernantus⁴
Alfarid S. Lamora⁵

¹⁻⁵ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “YKP” Yogyakarta

Alamat: Jl. Tambak, Tambak, Tambi, Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184

Korespondensi penulis: 7471080306970002@stieykp.ac.id

Abstract. *This paper discusses the role of fiscal policy in overcoming poverty in Indonesia through empowering village funds. Using a literature study approach, the data collection process uses secondary data from the Central Statistics Agency and the Ministry of Finance. This paper examines poverty analysis, factors that influence poverty, and the implementation of fiscal policy in reducing poverty levels. Apart from that, this research also discusses village fund empowerment policies, poverty alleviation strategies and implementation of village fund policies. The research results show that fiscal policy, especially increasing village fund allocation, can be effective in reducing poverty. Programs such as empowering village funds can improve community welfare and reduce poverty levels. Evaluation of the village fund empowerment policy shows a positive impact on poverty alleviation, with increasing village status and reducing poverty levels in rural areas. And by involving the community to participate in managing village funds so that the implementation of village funds can be achieved.*

Keywords: *Empowerment, Fiscal Policy, Village Funds, Poverty.*

Abstrak. Paper ini membahas tentang peran kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia melalui pemberdayaan dana desa. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, Proses pengumpulan data menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan. Paper ini mengkaji tentang analisis kemiskinan, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dan implementasi kebijakan fiskal dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi tentang kebijakan pemberdayaan dana desa, strategi pengentasan kemiskinan dan implementasi kebijakan dana desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, khususnya peningkatan alokasi dana desa, dapat secara efektif dalam mengurangi kemiskinan. Program-program seperti pemberdayaan dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Evaluasi kebijakan pemberdayaan dana desa menunjukkan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, dengan peningkatan status desa dan pengurangan tingkat pengangguran di wilayah pedesaan. Serta dengan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan dana desa sehingga implementasi dari dana desa dapat tercapai.

Kata kunci: Pemberdayaan, Kebijakan Fiskal, Dana Desa, Kemiskinan.

LATAR BELAKANG

Menurut Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan telah turun ke tingkat sebelum pandemi dan tren surplus perdagangan terus berlanjut. Angka kemiskinan melanjutkan tren penurunan dari 9,57 % pada September 2022 menjadi 9,36 % pada Maret 2023. Tingkat kemiskinan yang menurun menunjukkan bahwa perekonomian tetap tangguh, meskipun sempat mencapai dua digit akibat krisis pandemi. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 25,9 juta jiwa, turun 460.000 jiwa dibandingkan September 2022. Tercatat antara Maret 2021 hingga Maret 2023, total ada 1,6 juta orang yang mampu keluar dari garis

Received Maret 30, 2024; Accepted April 17, 2024; Published Juli 30, 2024

* Muh. Adzam, 7471080306970002@stieykp.ac.id

kemiskinan. (kemenku, 2023). Kemiskinan merupakan masalah serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. (Prawoto & Selatan, 2009)

Walaupun menurut data diatas menyebutkan bahwa persentase kemiskinan di Indonesia yang begitu tinggi, pemerintah selalu berupaya menurunkan angka kemiskinan dan dengan adanya dana desa dapat mengeluarkan Indonesia dari kemiskinan. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Tim Hukumonline, 2022). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih efektif dan efisien. (Sapitri & Alexandro, 2021)

Dana desa pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 sesuai dengan UUNo. 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kabupaten atau kota, oleh karena itu desa memiliki hak yang harus digunakan untuk mengelola dana desa tersebut. Sebagai penerapan dana desa serta demi tercapainya pengelolaan dana desa, masyarakat diharapkan untuk ikut serta berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah desa. Dana desa yang diberikan ke desa akan dikelola oleh pemerintah desa dengan tujuan semua kegiatan desa dapat terlaksana. Pengelolaan dana desa sama dengan pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat(6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kembali lagi bahwa kemiskinan merupakan masalah serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Kemiskinan merupakan kondisi sosial yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah dan masyarakat. Pemberdayaan dana desa menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh

pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mendiskusikan konsep kemiskinan, faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan, serta kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan dana desa. (Shuha Khalida, n.d.)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih efektif dan efisien. (Sapitri & Alexandro, 2021)

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan dana desa dapat menggunakan pendekatan studi literatur atau kajian literasi. Kajian ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti laporan, pustaka primer melalui jurnal, pustaka sekunder buku buku yang relevan, publikasi institusi, dan artikel populer yang sebagian diperoleh secara online. Pemilihan data didasarkan pada indikator yang digunakan dalam kajian publikasi institusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan dana desa menggunakan pendekatan kajian literasi. Pendekatan ini melibatkan analisis teoritis dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kemiskinan dan kebijakan fiskal terkait. Analisis ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang tepercaya tentang kebijakan fiskal dan pemberdayaan dana desa di Indonesia. Analisis data akan dilakukan melalui pendekatan deskriptif dan kualitatif untuk memahami dampak kebijakan fiskal dalam mengurangi kemiskinan dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan dana desa. Hasil Analisis ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dan pemberdayaan dana desa dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

PEMBAHASAN

KEBIJAKAN FISKAL MENGATASI KEMISKINAN

Menurut (D. Isnaeni., 2016) Kebijakan Fiskal dalam negara Indonesia tercermin dari APBN, dimana dapat mengatur inflasi agar tidak terjadi krisis moneter. Kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran yang ada di dalam negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Wibowo et al., 2019) Kebijakan fiskal seperti peningkatan alokasi dana desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kontribusinya terhadap PDRB. Pengeluaran pemerintah daerah diarahkan sebagai stimulus untuk meningkatkan

komponen PDRB lainnya seperti konsumsi dan investasi sehingga lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Salma Nazikha & Rahmawati, 2021) Kebijakan fiskal adalah serangkaian kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara guna mengatasi masalah kemiskinan. Kebijakan fiskal dapat meliputi berbagai jenis, seperti peningkatan pembelanjaan publik, perpajakan yang adil, dan subsidi bagi kelompok masyarakat yang rentan. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat mencakup langkah-langkah seperti penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dalam upaya mengurangi kemiskinan, efektivitas kebijakan fiskal harus dievaluasi secara berkala agar dapat menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Mengurangi Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, kebijakan fiskal yang tepat dapat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Misalnya, program bantuan sosial seperti program kartu keluarga sejahtera (PKH) di Indonesia telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan. (DN Fadhillah, 2023)

Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan investasi pada sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan. Contohnya, kebijakan fiskal yang memberikan insentif pajak kepada sektor industri padat karya atau sektor pertanian dapat menggerakkan perekonomian dan mengurangi angka pengangguran. (Iskandar Chang, 2023)

Selanjutnya, efektivitas kebijakan fiskal dalam mengurangi kemiskinan juga tergantung pada alokasi anggaran yang tepat. Anggaran harus dialokasikan secara efisien dan efektif untuk memastikan bahwa bantuan dan program-program yang ditujukan kepada masyarakat miskin benar-benar dapat mencapai sasaran dengan tepat. (Rahayu, 2012)

Selain itu, implementasi yang baik juga menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas kebijakan fiskal. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi-instansi terkait perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dapat diterapkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam implementasi kebijakan fiskal juga perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang telah diterapkan benar-benar memberikan dampak yang positif dalam

mengurangi kemiskinan serta memberikan masukan untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang. (Rafiq Ilyas, 2022)

STRATEGI MENGATASI KEMISKINAN

Program pemberdayaan dana desa digunakan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pemanfaatan dana yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya pemberdayaan dana desa, diharapkan masyarakat desa dapat mengembangkan potensi lokal mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Melalui program ini, dana desa harus dikelola dengan baik dan transparan, serta harus didukung dengan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Evaluasi terhadap kebijakan fiskal yang terkait dengan pemberdayaan dana desa perlu dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program ini. Dampak kebijakan fiskal terhadap pengurangan kemiskinan melalui dana desa juga harus dianalisis untuk memastikan bahwa program ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa. (Rakaseka Susanti, 2022)

Menurut (Deputi Novrizaldi, 2021) Salah satu strategi mengatasi kemiskinan untuk pemberdayaan dana desa adalah dengan melakukan pemutakhiran tingkat kabupaten hingga desa, integrasi bansos dan digitalisasi penyaluran, afirmasi penargetan untuk pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan layanan dasa

Selain itu, strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia meliputi penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, pengembangan budaya usaha, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, memperbaiki distribusinya, dan menumbuhkan swadaya setempat (Trimo Yulianto, 2020)

Menurut (Fahmi Ginanjar et al., 2018) Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan strategi yang efektif dalam penanggulangannya. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia antara lain rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya akses pekerjaan, keterbatasan modal untuk usaha mikro, dan rendahnya pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang holistik untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses pekerjaan, program kredit usaha mikro, dan program pemberdayaan perempuan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia secara signifikan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DANA DESA

Kebijakan pemberdayaan dana desa telah diimplementasikan sebagai upaya dalam menangani permasalahan yang ada di desa-desa. Permasalahan dana desa menjadi fokus utama dalam kebijakan ini. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kemampuan kepada desa dalam mengelola dana yang dimiliki secara mandiri. Implementasi kebijakan tersebut memiliki urgensi yang tinggi karena desa merupakan bagian penting dalam pembangunan negara. Dengan adanya kebijakan pemberdayaan dana desa, diharapkan desa dapat memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa secara berkelanjutan. (Putra Minang et al., 2021)

Implementasi kebijakan pemberdayaan dana desa memiliki urgensi yang penting untuk dilakukan. Pemberdayaan dana desa memiliki tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan menjadi sangat penting karena merupakan tahapan yang mengubah kebijakan menjadi tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Melalui implementasi kebijakan, dana desa dapat digunakan dengan efektif dan efisien, serta dapat merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan dana desa akan memberikan dampak yang signifikan dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. (Pembangunan et al., 2020)

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DANA DESA

Evaluasi kebijakan pemberdayaan dana desa bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat desa. Dalam evaluasi ini, kinerja pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat desa juga dinilai sebagai indikator keberhasilan kebijakan. Evaluasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai keberhasilan dan kekurangan kebijakan pemberdayaan dana desa sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, pemerintah dapat memastikan bahwa program pemberdayaan dana desa dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (MY Killa, 2021)



Gambar 1. Dana Desa dan Jumlah Desa

Sumber : Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023

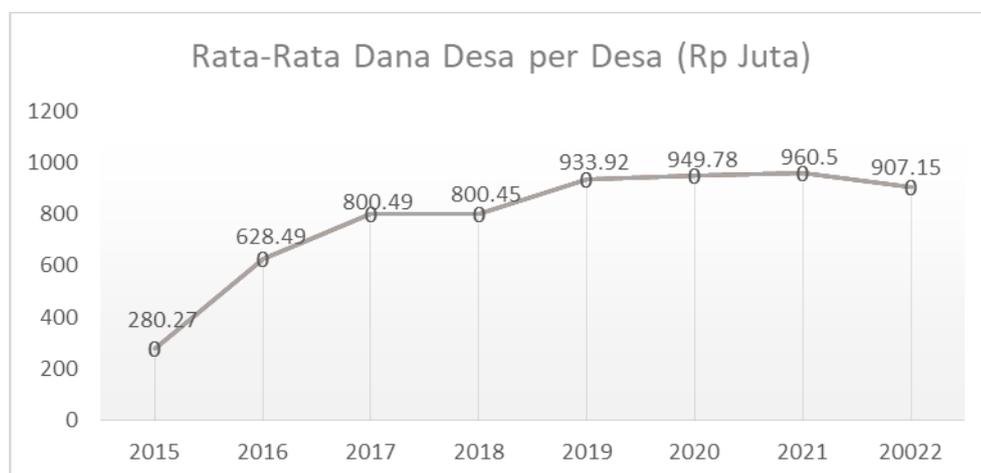


Gambar 2. Persentase Kemiskinan

Sumber : indonesiabaik.id/ Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Menurut (KPPOD, 2022) Pada September 2014, persentase kemiskinan di daerah perdesaan berada di angka 13,76%, dan pada bulan Maret 2022 tercatat turun ke angka 12, 29% atau berkurang sekitar 1,5%. Saat itu juga persentase pengangguran terbuka di daerah perdesaan mengalami penurunan dari 4,93% saat 2015 menjadi 4,17% ditahun 2021. Dan pada saat itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan pencatatan bahwa dari 2015 hingga 2022 status desa mengalami kenaikan secara signifikan. Menurut data, bahwa Desa Sangat Tertinggal mengalami pengurangan sebanyak 8.471 desa, awalnya 13.453 desa turun menjadi 4.982 desa. Desa Tertinggal

mengalami penurunan 24.008 desa, awalnya 33.592 desa menjadi 9.584 desa. Dan Desa Berkembang mengalami penambahan sebanyak 11.020 desa, dari yang awalnya 22.882 desa menjadi 33.902 desa. Kemudian Desa Maju juga mengalami penambahan sebanyak 16.641 desa, dari yang awalnya 3.608 desa menjadi 20.249 desa. Sedangkan Desa mengalami penambahan sebanyak 6.064 desa, dari awalnya 174 desa menjadi 6.238 desa. Sehingga semua kenaikan dan penurunan itu membuat pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid- 19 pun berlangsung relatif lebih cepat dibandingkan dengan negara- negara lain. Meskipun pada saat itu sempat tumbuh -5,32 pada kuartal II- 2020 dan terus-menerus negatif hingga 3 kuartal berikutnya, dan pada akhirnya perekonomian Indonesia tumbuh positif pada kuartal II- 2022 sebesar 7,07. Kemudian perekonomian Indonesia kembali tumbuh 3,51 pada kuartal III- 2022, dan tumbuh 5,02 pada kuartal IV- 2022, kemudian tumbuh 5,01 pada kuartal I- 2022, dan diperkirakan tetap tumbuh di atas 5 pada kuartal II- 2022. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan, sebelumnya banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa Dana Desa yang diberikan kepada 74.960 desa itu telah menghasilkan perputaran uang yang cukup tinggi yaitu hingga ratusan miliar di satu kabupaten. Sehingga, keberadaan Dana Desa selama tujuh tahun itu memberi dampak yang sangat baik seperti jumlah Desa Mandiri semakin banyak dan meningkatnya pembangunan infrastruktur desa seperti jembatan dan jalan desa.



Gambar 3. Rata-rata Dana Desa/Perdesa

Sumber : Bahan Kemenkeu - Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023

Bila merujuk data 2021, rata- rata Dana Desa setiap desa adalah Rp 960,5 juta, saat itu Dana Desa tertinggi Rp 5,49 miliar yaitu Desa Respen Tubu di Kalimantan Utara dan Dana Desa terendah sebesar Rp 675,8 juta yaitu Desa Keude Ie Leubeue di Aceh. Abdul Halim memberikan pernyataan bahwa Dana Desa menjadi salah satu kunci kuatnya perekonomian

nasional dalam menghadapi pandemi Covid- 19 selama 2,5 tahun terakhir. Terlebih lagi bahwa selama pandemi Covid- 19 yang berlangsung pada 2020-2021, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebanyak Rp 146,01 triliun terhadap 74.960 desa. Dari nominal itu, sebanyak Rp 8,92 triliun telah dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan di desa pada kegiatan Desa Tanggap Covid- 19, sebesar Rp 71,96 triliun telah digunakan untuk membangun infrastruktur desa, serta sebanyak Rp 21,29 triliun dari kisaran tersebut digunakan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa(PKTD). Selama pandemi Covid- 19, pemanfaatan Dana Desa untuk BLT Dana Desa dan PKTD menjadi peran penting dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di desa. Dampaknya dari BLT Dana Desa bisa menurunkan kemiskinan di desa sebesar 0,32% dari pada di kota yang malah naik 0,91% selama pandemi Covid- 19 dari tahun 2020-2021. Pada waktu yang sama, PKTD juga menahan naiknya tingkat pengangguran terbuka di desa lebih sebesar 0,25% daripada di kota yang naik 2,03% selama pandemi Covid- 19. Yang menjadi evaluasi adalah dana desa harus ditingkatkan lagi seiring dengan tingginya pendapat negara dari APBN. Dan dalam pelaksanaannya harus lebih terstruktur serta dalam pengawasan yang lebih ketat. Serta dalam eksekusinya bahwa daerah- daerah 3T harus mendapatkan nominal yang lebih tinggi daripada daerah- daerah yang sudah maju, guna penurunan kemiskinan Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan dana desa, ditemukan beberapa temuan yang relevan. Pertama, kebijakan fiskal merupakan alat yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Peningkatan alokasi dana desa dan pendanaan program-program pemberdayaan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin. Kedua, evaluasi kebijakan fiskal terkait pemberdayaan dana desa menunjukkan hasil yang positif. Program-program yang melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan dana desa berhasil meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Ketiga, kebijakan fiskal juga memiliki dampak yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan melalui dana desa. Dengan adanya dukungan yang cukup dan terencana, dana desa dapat digunakan secara efektif untuk mengembangkan infrastruktur, sektor pertanian, dan sektor ekonomi lainnya. Temuan ini menggambarkan pentingnya kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan dana desa.

SARAN

Terlepas dari implikasi positifnya, kajian ini memiliki banyak keterbatasan karena hanya berdasarkan narasi kajian literatur. Maka pembaca harus berhati-hati dalam menarik

kesimpulan dari hasil kajian ini, terutama untuk tujuan generalisasi. Oleh karena itu, harapannya penelitian selanjutnya dapat membahas masalah mengenai dana desa secara lebih rinci lagi.

DAFTAR REFERENSI

- D. Isnaeni., 2017. (2016). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING, 15(1), 165–175.
- Deputi Novrizaldi. (2021). Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat>
- DN Fadhilah. (2023). Implementasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dihubungkan dengan Permensos nomor 1 tahun 2018 dan asas kemanfaatan hukum.
- Fahmi Ginanjar, R. A., Setyadi, S., Suiroh, U., Adi, R., Ginanjar, F., Ilmu, J., Pembangunan, E., & Untirta, F. (2018). ANALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN. 8(2). <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>
- Iskandar Chang, H. H. D. P. (2023). EKONOMI PEMBANGUNAN - - Google Books. Media Literasi. file:///C:/Users/USER/Downloads/EKONOMI%20PEMBANGUNAN%20-%20Iskandar%20Chang,%20Hendri%20,%20Halim%20Dwi%20Putra%20-%20Google%20Books.htm
- kemenku. (2023). Angka Kemiskinan Semakin Turun, Kepala BKF: Sejalan Menguatnya Aktivitas Ekonomi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Angka-Kemiskinan-Semakin-Turun>
- KPPOD. (2022). Dana Desa Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran. Investor Daily. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1126>
- MY Killa, H. R. A. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Dana Desa.
- Pembangunan, P., Pemberdayaan, D., Di, M., Bolli, D., Ponre, K., Bone, K., Yusran, A., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2020). IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM The Implementation of Village Funds for Community Development and Empowerment in Bolli Village, Ponre District, Bone Regency. In J. Paradigma Administrasi Negara (Vol. 2, Issue 2).
- Prawoto, N., & Selatan, J. L. (2009). MEMAHAMI KEMISKINAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA. In Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (Vol. 9, Issue 1).

- Putra Minang, H., Digdowiseiso, K., Sugiyanto, E., & Studi Magister Administrasi Publik, P. (2021). PELAKSANAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESADALAM MEMPERDAYAKAN MASYARAKAT DESA: STUDI KASUS DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN. *Ilmu Dan Budaya*, 42(1).
- Rafiq Ilyas, M. (2022). EFEKTIVITAS PERUBAHAN ANGGARAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2020. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Rahayu, S. Iestari. (2012). *Ekonomi Keuangan*.
- Rakaseka Susanti. (2022). Efektivitas Penggunaan Dana Desa dan Kesesuaian Penggunaannya dengan Prioritas Nasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2018-2021.
- Salma Nazikha, R., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(2), 120–134. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134>
- Sapitri, S., & Alexandro, R. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2), 239. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786>
- Shuha Khalida. (n.d.). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa-desanya Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman).
- Trimio Yulianto. (2020). Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>
- Wibowo, B., Anggraeni, L., & Rindayati, W. (2019). Dampak Spillover dan Kebijakan Fiskal terhadap Pencapaian Pertumbuhan Inklusif antar-Provinsi di Indonesia. IPB University. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/97495>